

DAFTAR PUSTAKA

- Asfia Murni. 2006. *Ekonomika Makro*. Jakarta: PT.Refika Aditama.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah; Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba empat.
- Ignatius, Wursanto. 1991. *Kearsipan 1*. Yogyakarta: Kanisiuis.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Moekijat.1989.*Tata Laksana Kantor*.Bandung: Alumni.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kota Padang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan/Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik, untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah.

Yogyakarta: Andi

